

PARTAI-PARTAI ISLAM DAN PEMILU 1999

(Studi Kebijakan Presiden B.J Habibie tentang Multi Partai)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam**

Oleh:

Detri Soetiawan
NIM : 96121831

**SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

ABSTRAK

DETRI SOETIAWAN – NIM. 96121831. PARTAI-PARTAI ISLAM DAN PEMILU 1999
(STUDI KEBIJAKAN PRESIDEN B.J HABIBIE TENTANG MULTI PARTAI).
YOGYAKARTA: FAKULTAS ADAB UIN SUNAN KALIJAGA, 2003

Dari hasil Pemilu 7 Juni 1999, yang sering disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis kedua (setelah pemilu 1955), dari 19 partai Islam yang turut serta pada pemilu hanya ada 8 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah itu pun sangat jauh jika dibandingkan dengan perolehan suara Golkar apalagi PDI Perjuangan yang muncul sebagai pemenang Pemilu 7 Juni 1999.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dan metode yang digunakan metode historis yaitu rekonstruksi imajinatif tentang sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis kejadian masa lalu berdasarkan data yang sudah ada. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah pengumpulan data (heuristik), pengujian sumber (verifikasi), analisa data (interpretasi dan penulisan sejarah (historiografi).

Dalam menjalankan pemerintahan transisi, presiden Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan politik yang mendorong lahirnya demokratisasi di negeri ini. Adanya berbagai kebijakan tersebut tidak disia-siakan oleh kalangan politisi Islam untuk mendirikan partai-partai politik berbendera Islam atau berbasis massa Islam. Mulai bangkitnya Islam dalam panggung politik secara nyata terlihat dalam perebutan kursi kepresidenan Republik Indonesia di Sidang Umum MPR 1999, dimana kekuatan Islam membuat koalisi dalam parlemen yang diistilahkan Poros tengah, berhasil menggagalkan Megawati menuju kursi kepresidenan dengan menaikkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI ke 4.

Key word: partai Islam, Pemilu, kebijakan presiden, multi partai, B.J Habibie

Drs. Badrun Alaena, Msi

Dosen Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Detri Soetiawan

Kepada Yang Terhormat:

Dekan Fakultas Adab

IAIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Detri Soetiawan

NIM : 96121831

Judul : **Partai-partai Islam dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie Tentang Multi Partai)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora dalam Ilmu Sejarah Peradaban Islam. Karena itu kami berharap skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat disidangkan dalam sidang munaqasyah.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alikon wr. Wb

Yogyakarta, 17 Juni 2003

Pembimbing,

Drs. Badrun Alaena, M.Si

NIP. 15025322



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Tilpun (0274) 513949

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PARTAI – PARTAI ISLAM DAN PEMILU 1999
(STUDI KEBIJAKAN PRESIDEN B.J. HABIBIE TENTANG MULTI PARTAI)**

Diajukan oleh :


N a m a : **DETRI SOETIAWAN**
N I M : 96121831
Program : Sarjana Strata 1
Jurusan : SKI

telah dimunaqasyahkan pada hari : **Rabu** tanggal : **16 Juli 2003** dengan nilai : **B-** dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Humaniora (S.Hum.)**

Panitia Ujian Munaqasyah,


Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,


Drs. Dadung Abdurahman, M.Hum.
NIP. 150240122



Drs. Badrun, M.Si.
NIP. 150253322

Pembimbing/merangkap Penguji,


Drs. Badrun, M.Si.
NIP. 150253322

Penguji I,


Penguji II,


Drs. Dadung Abdurahman, M.Hum.
NIP. 150240122


Drs. Sujadi, MA.
NIP. 150275423

Yogyakarta, 26 Juli 2003




Prof. Dr. H. Machasin, M.A.
NIP. 150201334

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. Pencipta dan Penguasa alam semesta, yang telah memberikan banyak karunia kepada kita semua. Diantara karunia yang terlimpah itu adalah terselesainya skripsi ini yang berjudul **“Partai-Partai Islam Dan Pemilu 1999 (Studi Kebijakan Presiden B.J. Habibie tentang Multi Partai)”**.

Selanjutnya salam sejahtera saya haturkan, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran yang sesungguhnya, yang penuh cahaya Islam.

Meskipun skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun inilah karya ilmiah yang dapat saya persembahkan untuk almamater tercinta Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah sederhana ini banyak memberi manfaat bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan, khususnya bidang Sejarah dan Peradaban Islam.

Proses penyusunan skripsi ini akhirnya dapat selesai dengan baik berkat bimbingan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu maka ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku dekan fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Drs. Badrun Alaena, M.Si, selaku Ketua Jurusan Sejarah Peradaban Islam, sekaligus selaku pembimbing yang banyak berperan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap sanak famili terutama bapak dan ibu H.R. Soehemi selaku orangtua kami.
4. Para sahabat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Besar harapan bagi kami agar segala apa yang telah diberikan berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi Bangsa, Negara, demi tegak diinul Islam dan terciptanya tatanan masyarakat yang adil makmur “*Baladatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*” di bumi Indonesia. Dan yang terakhir semoga segala amal kebaikan mereka diterima disisi Allah SWT, Amin. Dan hanya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri.

Yogyakarta, 18 Juni 2003 M
17 Rabiul Akhir 1424 H

Penyusun

Detri Soetiawan
NIM. 96121831

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pembatasan dan Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| D. tinjauan pustaka | 10 |
| E. Landasan Teori | 11 |
| F. Metode Penelitian | 13 |
| G. Sistematika Penulisan | 14 |
| BAB II. REFORMASI POLITIK DI INDONESIA TAHUN 1998 | |
| A. Bayangan Reformasi Politik di Indonesia Tahun 1998 | 16 |
| B. Agenda Reformasi | 22 |
| C. Peta Kekuatan Politik di Indonesia 1998 | 27 |
| 1. Meliter | 28 |
| 2. Mahasiswa | 30 |
| 3. Partai Politik | 31 |

| | | |
|-----------------|--|----|
| BAB III. | ASPIRASI UMAT Islam DAN PEMILU 1999 | |
| | A. Aspirasi Umat Islam dalam Politik Orde Baru..... | 34 |
| | B. Implikasi pemikiran politik di era 70-an pada | |
| | Reformasi 1999..... | 44 |
| | C. Bangkitnya Politik Islam di Era Reformasi 1998..... | 46 |
| | D. Sistem Pemilu dan Sistem Kepartaian dalam | |
| | Pemilu 1999..... | 51 |
| | 1. Sistem Pemilu..... | 51 |
| | 2. Sistem Kepartaian..... | 54 |
| | E. Posisi Partai Islam dalam Pemilu 1999..... | 56 |
| BAB IV. | HASIL-HASIL PEMERINTAHAN TRANSISI | |
| | PRESIDEN B.J. HABIBIE | |
| | A. Kebijakan Politik Pemerintahan Transisi | |
| | Presiden B.J. Habibie..... | 61 |
| | B. Kekerasan Politik Pasca Orde Baru | 73 |
| | C. Hasil Pemilu dan Peran Politik Islam dalam | |
| | Sidang Umum MPR 1999..... | 75 |
| BAB VI | PENUTUP | |
| | A. Kesimpulan..... | 83 |
| | B. Saran..... | 86 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut sensus penduduk tahun 1990, sejumlah 87 % penduduk Indonesia adalah muslim.¹ Walaupun prosentase umat Islam yang sedemikian signifikan itu hanya merupakan data statistik. Artinya data ini merupakan data dari mereka yang *ber-KTP* Islam, atau yang mengaku dirinya muslim. Melihat data jumlah penduduk Indonesia yang nota bene mayoritasnya beragama Islam, ternyata dalam kancah perpolitikan Indonesia, mayoritas penduduk muslim ini mengalami pasang-surut dari satu babakan sejarah ke periode berikutnya.

Merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri bahwa 87 % penduduk Indonesia yang mayoritas muslim merupakan aset politik bagi kekuasaan yang ada di Indonesia dalam memperoleh dukungan guna melegitimasi kekuasaan yang sedang berjalan. Akan tetapi kenyataan berbeda yang terjadi di lapangan, sistem pemerintahan Orde Baru yang dibangun Presiden Soeharto dengan kekuasaan yang otoriter, lewat pendekatan stabilitas politik dan ekonomi melalui kekerasan telah menjadikan golongan Islam yang mayoritas ini termarjinalkan dalam kurun waktu tiga dekade pemerintahan rezim ini. Tentang ketertindasan politik umat Islam ini seorang tokoh umat Islam Indonesia di abad ini, Mohammad Natsir pernah mengungkapkan kegeramannya di awal pemerintahan Orde Baru dengan

¹ Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde baru*, (Yogyakarta : Tiara Wacana 2001), hlm. 27.

mengatakan "*They have treated us like cats with ringworm*", yang secara harfiah berarti, "Mereka telah memperlakukan kami layaknya kucing-kucing kurap".²

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa Orde Baru merupakan satu-satunya partai wadah politik penampung aspirasi umat Islam hasil fusi dari empat partai Islam (Parmusi, NU, PSII, dan Perti), pada tahun 1975 selalu gagal menjadi mayoritas di parlemen yang selalu didominasi oleh Golongan Karya sejak pemilu pertama di era Orde Baru 1971 sampai dengan Pemilu 1997. Golkar yang merupakan partai buatan pemerintah atau minimal sangat dekat hubungan kepentingannya dengan pemerintah selalu memperoleh suara terbanyak, dan menjadi *single majority* (mayoritas tunggal).³ Puncaknya adalah dengan diberlakukannya UU No. 8 /1985 yang mengharuskan semua orsospol menggunakan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas. PPP yang semula bercirikan Islam dengan Ka'bah sebagai lambang partainya, harus menggantinya dengan asas tunggal Pancasila dan meninggalkan Ka'bah sebagai lambang partainya. Dengan sendirinya PPP menjadi partai terbuka, dan tidak saja menjadi milik golongan Islam. Akibatnya tidak ada lagi partai Islam dalam kancah perpolitikan Indonesia di masa Orde Baru sampai dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Jatuhnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menandai berakhirnya kekuasaan rezim Orde Baru. Karena Soeharto sendiri sebagai individu merupakan simbol dari sistem Orde Baru tersebut. Selama 32 tahun

² Al-Chaidar, *Pemilu 1999 :Pertarungan Politik Partai-partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, (Jakarta: Darul Falah, 1999), hlm. 143.

³ Novel Ali, "Kejahatan Demokrasi", *Tajuk Rencana Kompas*, 15 Desember 1998.

pemerintahan Soeharto secara sistematis berhasil membangun kekuasaan yang otoriter, dan menjadikan dirinya kultus individu dengan jaringan patronase politik dan ekonomi melalui pendekatan kekerasan dalam skala *komprehensif*.⁴ Dengan berakhirnya rezim Orde Baru, maka babak baru sejarah perpolitikan Indonesia memasuki apa yang di kemudian hari disebut dengan era Reformasi dibawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

Jangka waktu pendek pemerintahan Habibie jelas tidak terlalu ideal, karena dianggap dekat dan sebagai salah satu kroni Presiden Soeharto yang manja dan dimanjakan. Kepresidenanya ditandai dengan kesulitan besar usaha menyesuaikan diri pada perkembangan yang terjadi mendadak, yaitu reformasi politik.

Namun melihat dari singkatnya pemerintahan Habibie bukan berarti tidak meninggalkan perubahan sama sekali. Meski jabatan presiden hanya dipegang Habibie selama satu tahun enam bulan, perubahan yang dilakukannya cukup dahsyat. Peran Habibie membuka gerbang reformasi agaknya lebih berarti dibanding upaya merintis industri dirgantara dan kurang berhasilnya di bidang ekonomi. Di masa Habibie inilah masyarakat bebas menyatakan ekspresinya. Keran pendirian partai politik dibuka lebar-lebar. Pers yang selama ini di bekap dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menjadi bebas merdeka. Pendekatan demokrasi yang digunakannya berbeda dengan pendahulunya, melalui

⁴ Valina Singha Subekti, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 11.

pendekatan stabilitas politik dan keamanan: “Stabilitas akan terjadi dengan sendirinya, jika sudah ada transparansi demokrasi dan kesejahteraan”. Kata Habibie.⁵

Salah satu hasil reformasi yang terpenting adalah dibukanya kebebasan berpendapat dan berkumpul yang ditandai dengan banyaknya partai politik (multi partai) pada Pemilu 7 Juni 1999 dengan berbagai asas dan ciri dengan tetap harus mengakui satu-satunya asas negara, yaitu Pancasila. Partai-partai barupun bermunculan dan dideklarasikan bahkan tampil dalam berbagai kesempatan untuk mempropagandakan ide-ide dan program-program mereka. Ratusan partai telah berdiri dan berusaha mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman untuk mendapat pengesahan. Tidak ketinggalan media massa sebagai alat pengarah dan penggiring massa mengikuti gejala pluralitas dengan masing-masing menekankan dan menonjolkan partai yang cenderung didukungnya.⁶

Sebagaimana dikemukakan oleh Andrew Heywod di dalam *Virtues and Vices of Democracy*, bahwa penghormatan terhadap demokrasi ditentukan oleh nilai-nilai kebebasan yang diberikan kepada masyarakat. Ciri lain dari masyarakat yang demokratis adalah keleluasaan media massa untuk dapat menyampaikan berita terhadap masyarakat luas. Begitupun berkurangnya dominasi militer dan birokrasi pemerintah dalam urusan politik publik menjadi prasyarat demokrasi. pemilihan umum yang bebas tanpa intimidasi adalah indikator terpenting dalam

⁵ “Habibie Menunggangi Lompatan Teknologi”, *Forum Keadilan*, No. 40, 9 Januari 2000.

⁶ Lebih lanjut lihat di [www. Iltizam-net](http://www.Iltizam-net).

pelaksanaan demokrasi. Hal-hal tersebut di atas secara nyata didapatkan oleh masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada masa itu “euphoria” reformasi telah merobohkan sekat-sekat *otoritarian*. Pencabutan UU yang membatasi kegiatan pers, perubahan UU politik yang memperkenankan pembentukan partai-partai baru, serta pelaksanaan pemilu yang jujur, merupakan jembatan emas kebangkitan demokrasi di Indonesia. Harus diakui pasca kejatuhan Soeharto, Habibie memiliki jasa yang besar dan memberi ruang yang luas untuk pertumbuhan demokrasi.⁷

Perubahan yang terjadi dalam UU Politik No.2 Tahun 1999 secarta tidak langsung telah membukakan pintu akan berdirinya partai-partai yang berasaskan Islam ataupun yang berbasis massa Islam untuk berkompetisi dalam Pemilu 7 Juni 1999. Hal ini pada era Orde Baru tidak pernah terjadi, karena aspirasi umat Islam hanya disalurkan melalui satu wadah partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum berlakunya asas tunggal Tahun 1985.

Adanya perubahan yang sangat frontalnya ini turut pula mendorong munculnya Islam sebagai kekuatan politik yang tercermin dari berdirinya partai partai politik berbendera Islam. Tercatat dari 48 partai peserta pemilu pada tanggal 7 Juni 1999 ada 19 partai politik yang dapat dikategorikan sebagai partai Islam.⁸

⁷ Yudi Chrisnandi: “Pengorbanan Habibie dan Gus Dur”, dirilis dari www.dephan.go.id

⁸ Sudirman Tebba, *Islam Pasca*, hlm iii.

Kembalinya Islam sebagai kekuatan politik seolah melanjutkan tradisi “lembaran lama” yang pernah muncul pada perpolitikan nasional, sekaligus membangkitkan “romantisme lama” yang sempat direduksi oleh pemerintah Orde Baru yang sekuler dengan keharusan partai politik dan ormas Islam menerima asas tunggal Pancasila.⁹ Harapan akan terbitnya fajar baru dalam sejarah perpolitikan Islam pasca kejatuhan Soeharto 21 Mei 1998, sangat merebak di kalangan masyarakat maupun tokoh-tokoh Islam untuk kembali ke panggung politik baik dalam parlemen maupun di luar parlemen.

Apa yang terjadi di Indonesia pada penghujung Abad XX ini hampir serupa dengan awal pemerintahan Orde Baru, dimana pada kalangan aktifis Islam timbul optimisme untuk kembali memainkan peran dominan dalam percaturan politik nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim Orde Lama.¹⁰ Logikanya karena Orde Baru lahir dengan idealisme demokrasi, maka umat Islam memiliki harapan besar untuk kembali berperan mengingat mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.¹¹

Seperti telah disebutkan di atas bahwa pemerintahan Presiden Habibie yang singkat ini dihadapkan pada kesulitan besar berupa tuntutan reformasi total yang harus dijalankan segera mungkin. Pemerintahan B.J. Habibie adalah pemerintahan di bawah tekanan yang berat. Hal ini dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin pemerintahan transisi Habibie dituntut melaksanakan

⁹ Fahrudin Salim, “PPP Reaktualisasi Ideologi Parta”, *Kompas*, 1 Desember 1998.

¹⁰ Abdul Azis Thoba. MA, *Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 25.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 242.

Pemilihan Umum (pemilu) dengan undang-undang yang baru hanya dalam jangka waktu satu tahun. Sedang rezim Orde Baru pada awal kepemimpinan Presiden Soeharto melaksanakan pemilu empat tahun setelah beliau berkuasa. Ketetapan MPRS No. XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan pada tahun 1968 diubah dalam Sidang Istimewa 1967 untuk melaksanakan pemilu pada tahun 1971.¹²

Dari hasil Pemilu 7 Juni 1999, yang sering disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis kedua (setelah pemilu 1955), dari 19 partai Islam yang turut serta pada pemilu kali ini hanya ada 8 partai yang mendapatkan kursi di parlemen. Jumlah itu pun sangat jauh jika dibandingkan dengan perolehan suara Golkar apalagi PDI Perjuangan yang muncul sebagai pemenang Pemilu 7 Juni 1999.

Melihat data statistik di atas tadi kita dapat mengetahui bagaimana sesungguhnya kekuatan partai-partai Islam dalam Pemilu 7 Juni 1999. Akan tetapi perhitungan politik bukanlah perhitungan matematis diatas kertas. Selanjutnya penulis dalam skripsi ini nanti akan membawa permasalahan pada bagaimana hubungan kebijakan penguasa transisi (Presiden Habibie) dan pengaruhnya terhadap kiprah dan sepak terjang serta posisi partai-partai Islam pada pemilu 1999. Satu hal yang menarik bahwa partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah pada Sidang Umum MPR Oktober 1999, telah berhasil menggagalkan ambisi Megawati mejadi presiden, untuk menjadikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI ke-4.

¹² Lebih lanjut lihat di www.Museum-KPU.com

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Perjalanan panjang partai-partai Islam dalam sejarah penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah mengalami pasang-surut sejak diselenggarakannya pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955. Berbagai rezim yang berkuasa di negeri ini telah menempatkan partai Islam dalam berbagai posisi. Tiga dasawarsa pemerintahan Orde Baru cukup membuat kecewa dan luka yang cukup dalam bagi umat Islam di Indonesia. Adanya eskalasi politik yang cukup cepat mengiringi reformasi politik di Indonesia turut membawa angin segar bagi sejarah politik umat Islam Indonesia. Berdirinya partai-partai politik berideologi dan berbasis massa Islam di masa ini telah menandai bangkitnya kekuatan Islam dalam perpolitikan nasional, sampai dengan diselenggarakan Pemilu 7 Juni 1999.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi pembahasan tentang peran Islam dalam politik di Indonesia pasca Orde Baru. Karena persoalan sejarah adalah persoalan *kausalitas* (hubungan sebab-akibat), maka pembahasan dalam skripsi ini akan sedikit membahas persoalan politik Islam di masa Orde Baru sebagai latar belakang kebangkitan Islam dalam panggung politik di Indonesia juga implikasi dari kebijakan pemerintahan transisi. Sedangkan batasan tahun 1999 dipakai karena pada tahun inilah puncak pertarungan politik serta mengakhiri pemerintahan transisi presiden B.J. Habibie.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut di atas maka, selanjutnya permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana reformasi politik yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998?
2. Bagaimana umat Islam dalam menyalurkan aspirasinya pasca kejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998?
3. Kebijakan-kebijakan apa yang diambil Presiden B.J Habibie dan hubungannya dengan kebangkitan umat Islam dalam politik nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a Mengetahui apa yang terjadi dalam perpolitikan umat Islam di Indonesia pada era reformasi tahun 1998.
- b Mengetahui sejauh mana umat Islam dapat menyalurkan aspirasinya di masa Orde Baru, dan pasca kejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998.
- c Mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintahan transisi Presiden B.J. Habibie terhitung dari tanggal 21 Mei 1998, yang mempunyai hubungan dengan bangkitnya umat Islam dalam politik nasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah khazanah pengetahuan, khususnya kajian Sejarah dan Politik Islam.
- b. Memperkaya pemahaman terhadap sejarah politik Islam yang berkaitan dengan Pemilu 7 Juni 1999, dan kekuatan politik Islam pada Sidang Umum MPR Oktober 1999.
- c. Memberi motivasi bagi penghargaan terhadap sejarah dan kesejarahan bangsa, khususnya yang berkaitan dengan politik Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Kompas pada tanggal 15 Juli 2000 memuat artikel dengan sebuah judul "*Demokrasi Indonesia (dilema dan saran keluar atasi krisis)*", yang di tulis oleh Nurcholis Madjid menuliskan bahwa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam jangka waktu pendek tidaklah ideal. Hal senada juga pernah ditulis oleh Arbi Sanit dalam sebuah bukunya "*Reformasi Politik*" terbitan Pustaka Pelajar Yogyakarta Juli 1998, bahwa kepemimpinan Habibie bukanlah kepemimpinan yang populer, artinya kepemimpinan Habibie tidak mempunyai dukungan massa yang kuat dari bawah. Akan tetapi walaupun dikatakan kepresidenan Habibie tidak populer atau tidak ideal, sebuah fakta bahwa demokratisasi justru muncul pada saat Habibie berkuasa, dengan dibukanya era multi partai pada perpolitikan Indonesia.

Pasca kejatuhan Presiden Soeharto 21 Mei 1998, seiring dengan era keterbukaan maka banyak tulisan-tulisan baik dalam bentuk artikel di media ataupun dalam bentuk buku tentang Reformasi ataupun bagaimana masa depan Islam pasca Soeharto. Di antaranya adalah "*Islam Pasca Orde baru*" terbitan Tiara Wacana Yogyakarta 2001 di tulis oleh Sudirman Tebba, dalam buku ini ditulis bagaimana harapan dan peluang umat Islam pasca kejatuhan Soeharto. Kemudian buku yang berjudul "*Islam dan Politik (Upaya Membingkai Peradaban)*" karangan Ahmad Syafi'i Ma'arif terbitan Pustaka Dinamika Cirebon 1999 menulis tentang Islam sebagai pilar peradaban di Indonesia pada era reformasi. Selain itu kajian tentang Islam pasca orde baru juga banyak di tulis dalam berbagai artikel di media massa baik sekup lokal maupun nasional.

Dari berbagai tulisan di atas tadi dan berbagai artikel yang pernah dimuat di media massa jarang terdapat tulisan yang mengangkat sisi kebijakan atau peran serta penguasa transisi B.J. Habibie dalam proses reformasi yang sedang berlangsung. Maka dalam skripsi ini penulis ingin melihat peran penguasa sebagai pemegang kebijakan dan peran politik umat Islam yang diwujudkan pada partai-partai politik dalam pemilu 1999, dalam hubungan yang saling terkait dan tidak dapat di pisahkan satu dan lainnya sebagai hubungan sebab-akibat. Sejauh ini dalam sepengetahuan penulis belum ada yang mengangkat persoalan tersebut.

E. Landasan Teori

Kebijakan (*policy*) merupakan hasil dari suatu keputusan setelah melalui suatu pemilihan alternatif yang tersedia dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian kebijakan akan menyangkut dua aspek besar yaitu proses pembuatan keputusan serta dampak daripada pelaksanaan kebijakan tersebut.¹³ Dalam menganalisis kebijakan (*policy*) publik, ada beberapa pendekatan yang dipakai, di antaranya adalah pendekatan kelompok (*group theory*).

Pada pendekatan kelompok (*group theory*) kebijakan publik lebih pada perjuangan kelompok-kelompok yang membawa kepentingan masing-masing. Individu-individu yang mempunyai kepentingan yang sama akan membentuk suatu

¹³ Waluyo Iman Isworo, "Beberapa Pendekatan Dalam Analisis Dan Implementasi Kebijakan Publik" dalam Mirian Budiardjo, *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 229.

kelompok baik formal maupun informal guna guna menekan permintaan mereka pada pemerintah.¹⁴

Adanya kepentingan dalam masyarakat Indonesia pasca Orde Baru yang diterjemahkan dalam kelompok-kelompok perlawanan baik yang dikoordinir mahasiswa ataupun kelompok tokoh-tokoh politik, memberikan tekanan yang cukup untuk menekan kebijakan pemerintah transisi. Jika kita perhatikan kebijakan pemerintahan transisi B.J. Habibie lebih merupakan fungsi untuk mengelola konflik antar kelompok dengan menekankan pada kompromi dan konspirasi politik. Kabinet Pembangunan Reformasi pimpinan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, menggambarkan gabungan dari kelompok-kelompok politik yang ada, yang tidak pernah terjadi semasa Orde Baru.

Menurut Bentley, kelompok juga mengacu pada beragam ukuran, intensitas dan tehnik-tehniknya. Kelompok-kelompok tersebut bisa besar maupun kecil, satu sama lain dapat berbeda derajat pemusatan kepentingan, dan mungkin menggunakan berbagai jenis metode dari propaganda, persuasi dan ancaman dengan kekerasan, hingga cara yang paling buruk.¹⁵ Seperti pengerahan kekuatan massa yang besar menjelang Sidang Istimewa 1998 dan Sidang Umum Oktober 1999, yang merupakan cara kelompok-kelompok untuk memaksakan keinginannya.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 234.

¹⁵ S P. Varma, *Teori Politik*, hlm. 234.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode sejarah (historis) yaitu rekonstruksi imajinatif tentang sejarah melalui proses menguji dan menganalisa secara kritis kejadian masa lalu berdasarkan data yang sudah ada. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh adalah: pengumpulan data (*heuristik*), pengujian sumber (*verifikasi*), analisa data (*interpretasi*) dan terakhir penulisan sejarah (*historiografi*).¹⁶

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan atau menjelaskan metode-metode di atas sebagai berikut:

1. *Heuristik*. Ada dua sumber sejarah yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu sumber lisan dan sumber tulisan. Sumber tertulis dapat diperoleh dari karya-karya berupa buku-buku atau tulisan artikel dalam media massa, serta berita-berita yang termuat dalam media massa.
2. *Verifikasi*. Ada dua cara untuk menguji kevalidan atau keaslian data (sumber) yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern adalah menguji informasi atau data, apakah data yang dikumpulkan dapat dipercaya atau tidak dengan cara menganalisa dan menjabarkan isi yang terdapat dalam data tersebut. Kritik ekstern adalah menguji informasi atau data dengan membandingkan data yang satu dengan data yang lain .
3. *Interpretasi*. Langkah ini merupakan proses analisis data, kegiatan analisa data terdiri atas tiga komponen utama yaitu, (a) reduksi data (b) sajian data (c)

¹⁶ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Bintang Budaya, 1995), hlm, 94-102.

penyimpulan.¹⁷ Ketiga cara tersebut merupakan alur kegiatan analisis untuk membuat data menjadi bermakna. Analisis data adalah suatu proses mencari dan mengatur dan menata secara sistematis, dokumentasi dan catatan lapangan lainnya. Penataan tersebut dimaksud untuk mempermudah memahami data-data dan menyajikannya sebagai hasil temuan dalam penelitian.

4. *Historiografi*. Historiografi adalah penulisan sejarah. Penulisan sebagai tahap akhir dari prosudur penelitian ini. Proses ini diusahakan dengan selalu memperhatikan aspek-aspek kronologis. Sedangkan penyajiannya berdasarkan tema-tema penting dari setiap perkembangan objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, tulisan ini dibagi dalam lima bab. Setiap bab memiliki hubungan organis yang menjadikannya sebuah kesatuan pembahasan yang utuh.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, akan memaparkan tentang reformasi politik tahun 1998. Dalam bab ini akan diterangkan bagaimana sesungguhnya krisis politik yang terjadi di Indonesia sampai terjadinya reformasi politik 1998, seterusnya akan di

¹⁷Nashuddin, *Pertumbuhan dan*, hlm, 15.

terangkan pula apa saja yang menjadi agenda reformjasi politik, serta peta politik di Indonesia tahun 1998-1999.

Bab ketiga, sebagai kelanjutan dari bab kedua (Reformasi Politik 1998) maka dalam bab ini akan dibahas tentang partai-partai Islam yang di mulai dari kilas balik perjalanan partai-partai Islam dalam era Orde Baru. Sebagai pelengkap akan disajikan bagaimana sistem pemilu dalam pemilu 7 Juni 1999, dan akhirnya dengan melihat posisi partai-partai Islam dalam pemilu 7 juni 1999.

Bab keempat, akan mengulas tentang kebijakan-kebijakan politik yang diambil pemerintahan transisi B.J. Habibie dalam mendorong kebangkitan partai-partai politik berideologi atau berbasis massa Islam serta menandai bangkitnya kembali kekuatan politik Islam dalam perpolitikan nasional Indonesia, yang dituangkan dalam berbagai perundang-undangan diantaranya tentang kebebasan pers, kebebasan berkumpul, undang-undang kepartaian, undang-undang pemilu serta kedudukan DPR, MPR dan DPRD

Bab kelima, yaitu sebagai penutup yang berisi kesimpulan umum dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

Sebagai pelengkap, pada bagian akhir disertakan daftar pustaka serta lampirans-lampiran sebagai pendukung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian dan paparan yang telah termuat dalam bab-bab terdahulu tentang kondisi perpolitikan Islam di Indonesia pasca Orde Baru sampai dengan Pemilu 7 Juni 1999, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa reformasi politik yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dari akumulasi persoalan-persoalan yang tidak kunjung terselesaikan selama Orde Baru berkuasa serlama tiga dekade. Lebih lanjut adanya reformasi politik di Indonesia mempunyai harapan akan munculnya demokratisasi, serta terbangunnya saluran komunikasi yang lancar antara penguasa (elite penguasa) dengan rakyatnya. Reformasi sendiri mencapai puncaknya dengan jatuhnya presiden soeharto dari kursi kepresidenan.

Adapun yang menjadi agenda dari reformasi politik ini serta sebagai arah yang ingin dicapai sesuai dengan tuntutan masyarakat adalah;

- a. Partisipasi umum yang terbuka dan adil (pelaksanaan penuh kedaulatan rakyat).
- b. Transparansi struktur-struktur sosial politik proses-proses kebijakan pemerintah.
- c. Tegaknya *civic morality*, hingga tercegahnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

- d. Tegaknya negara hukum, dan dihentikannya negara kekuasaan.
- e. Efektifitas pengawasan sosial terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.
- f. Memberikan kesejahteraan yang merata, baik dalam perspektif kewarganegaraan (keadilan sosial), maupun kewilayahan (otonomi).
- g. Perubahan orientasi pembangunan dari banyak tergantung pada pihak asing, menuju pada tekanan pemberdayaan maksimal potensi bangsa sendiri, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
- h. Peneguhan kembali harkat dan martabat bangsa sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh.

Sedangkan peta kekuatan politik di Indonesia pasca jatunya Soeharto di isi oleh militer, mahasiswa, dan parpol (partai politik).

2. Dalam menyalurkan aspirasinya umat Islam dimasa Orde Baru ini hanya tertampung dalam satu wadah politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Akan tetapi dari satu partai yang ada inipun aspirasi umat Islam belum tersalurkan sepenuhnya, mengingat dalam tubuh umat Islam sendiri sangat prular.

Kemudian politik Islam di era ini berada pada posisi yang marginal.

Hubungan antara Islam dan negara berdiri dalam suasana saling

mencurigai. Dan baru setelah akhir dekade 80-an Islam mulai bangkit kembali dalam percaturan politik di Indonesia.

Dalam pemilu 1999 setelah diberlakukannya sistem multi partai oleh pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Presiden Habibie partai-partai Islam dapat bermunculan dan menjadi wadah penyaluran aspirasi umat Islam.

3. Dalam menjalankan pemerintahan transisi, presiden Habibie mengeluarkan beberapa kebijakan politik yang mendorong lahirnya demokratisasi di negeri ini. Di antara kebijakan tersebut adalah dengan melepaskan sejumlah tahanan politik yang dipenjarakan akibat bersebrangan politik dengan penguasa Orde Baru. Dalam dunia pers Habibie mendorong terciptanya dunia pers yang bebas, guna menjadi kontrol sosial bagi kekuasaan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaan demokratisasi pemerintahan Transisi mengambil langkah percepatan pemilu dengan diberlakukannya sistem multi partai pada pemilu 7 Juni 1999. Satu kebijakannya yang paling kontroversial adalah jajak pendapat di Timor Timur yang berakibat pada lepasnya Timor Timur dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adanya berbagai kebijakan tersebut tidak disia-siakan oleh kalangan politisi Islam untuk mendirikan partai-partai politik berbendera Islam atau berbasis massa Islam. Selanjutnya dengan mulai bangkitnya Islam dalam panggung politik secara nyata terlihat dalam perebutan kursi

kepresidenan Republik Indonesia di Sidang Umum MPR 1999, dimana kekuatan Islam membuat koalisi dalam parlemen yang diistilahkan dengan sebutan Poros Tengah, berhasil menggagalkan Megawati menuju kursi kepresidenan dengan menaikkan Abdurahman Wahid sebagai presiden RI yang ke-4.

B. Saran

Berbagai gambaran di masa lalu baik yang tertulis dengan tinta emas, maupun terdapat dalam lembaran hitam, adalah suatu catatan sejarah. Catatan sejarah ini, akan menjadi suatu pelajaran bagi generasi berikutnya, agar tidak lagi terjatuh dalam lubang yang sama untuk yang keduakalinya.

Dalam perpolitikan Islam seperti yang telah panjang lebar dibahas terdahulu ada beberapa saran, antara lain:

1. Agar umat Islam tidak lagi menjadi pihak yang terpinggirkan dalam panggung politik di Indonesia, maka umat harus terus berdiri dalam satu barisan demi tegaknya amar ma'ruf nahi munkar, dan terwujudnya "*Baldatun Toyyibatun wa Rabbun Ghofur*".
2. Umat Islam sebagai mayoritas di negeri ini harus berfikir dengan pola pikir sebagai umat mayoritas pula. Artinya, sebagai umat mayoritas dari segi jumlah harus pula mayoritas dari peranan mengelola kebijakan di negeri ini.

3. Walaupun di era multi partai seperti sekarang ini Islam terbagi dalam berbagai kelompok dan partai politik, akan tetapi kelompok-kelompok ini harus berada dalam satu jaringan yang solid. Seperti dalam Sidang Umum 1999 dimana partai-partai Islam dalam parlemen membuat jaringan yang disebut poros tengah. Hingga kemudian poros tengah ini menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan lawan-lawan politik Islam.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Taufik, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif*, (Jakarta, Gramedia, 1985)
- Al-Chaidar, *Pemilu 1999 :Pertarungan Idiologi Partai-partai Islam Versus Partai-Partai Sekuler*, (Jakarta, Darul Falah, 1999)
- _____, *Reformasi Prematur (Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total)*, (Jakarta, Darrul Fallah, 1999)
- Aminuddin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999)
- Budiardjo, Mirian, *Teori-Teori Politik Dewasa Ini*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996)
- Kusumah, Atma, *Kebebasan Pers dan Arus Informasi di Indonesia*, (Jakarta:Lembaga Studi Pembangunan, 1981)
- Mardjono, H. Hartono, *Reformasi Suatu Keharusan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998)
- Mashad, Dhuradin, *Reformasi Sistem Pemilihan dan Peran Sospol ABRI*, (Jakarta, Grasindo, 1998)
- Renyaaan, Yopie (ed), *Transisi Demokras: Evaluasi Kristis Penyelenggaraan Pemilu1999*, (Jakarta, Komite Independen Pemantau Pemilu, 1999)
- Samego, Indria, *Menata Negara, Usulan LIPPI Tentang RUU Politik*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Sanit, Arbi, *Reformasi Politik*,(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998)
- Subekti, Valina Singha, *Mengubur Sistem Politik Orde Baru*, (Bandung, Mizan, 1998)
- Suryakusuma, Julia I, (ed), *Almanak Parpol Indonesia: Pemilu 1999*, (Bogor, SMK Grafika Mardi Yuana, 1999)
- Tebba, Sudirman, *Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta : Tiara Wacana 2001)

_____, *Islam dan Negara: Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Tim Ilmu politik UI, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1997)

Varma, S P, *Teori-Teori Politik Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)

W Hener, Robert, *ICMI dan Perjuangan menuju Kelas Menengah Indonesia*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995)

Artikel

Adiwijoyo, Suwarno, "Harus Back to Basic", *Gatra* No. 47 Th. IV, 10 Oktober 1998

Dhakidhae, Danier, "Pemilihan Umum di Indonesia" *Prisma* No. 9 September 1998.

Dzakiri, Muh. Hanif, "Parpol dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil", *Kompas*, 3 April 1999

Haris, Samsudin "PPP: Reformasi Dibawah Lindungan Ka'bah", *Kompas*, 28 November 1998.

Madjid, Nurcholis, "Reformasi Kita", *Gatra*, 16 Mei 1998

Novel, Ali, "Kejahatan Demokrasi", *Kompas* 15 Desember 1998

Salim, Fahrudin, "PPP Reaktualisasi Idiologi Partai", *Kompas*, 1 Desember 1998

Salim G.P, M. Arskal "Islam Relasi Agama dan Negara di Indonesia", *Kompas*, 4 Desember 1998.

Shiddiq, Mahfudz, "Perubashan Peta Politik Islam Pasca Orde baru", *Aktualita Dunia Islam*, No 68, 15-21 Mei 1998.

Sosrodiharjo, Sudjito, "Partai Politik dalam Masa Peralihan", *Kompas*, 22 September 1999.

Syuni, Ismail, "Wajar jika Rakyat Ingin Negara Islam", *Sabili*, No13 Th.VI, 6 Januari 1999, hlm 46.

Media

FORUM keadilan, No. 40, 9 Januari 2000 .

_____, No.25, 22 Maret 1999 .

Gatra, 30 Mei 1998 -

_____, 10 November 1998 .

Kompas 25 Maret 1998

_____,16 April 1999.

_____,5 Oktober 1999.

_____, 21 Oktober 1999.

Sabili, No.7 Th.VII, 22 September 1999 ,

_____, No. 9 Th VII, 20 Oktober 1999,

_____, No. 13 TH. VI. 6 Januari 1999.

_____, No.17 Th. I 19 Februari 1996 .

www.dephan.go.id

www.iltizam.net

www.Museum-KPU.com.